



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 27 S.D 29 NOVEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait implementasi beberapa kebijakan pemerintah cq Kemendikbud RI untuk pendidikan dasar dan menengah, yaitu relaksasi penggunaan dana BOS, pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh/PJJ, kebijakan kuota internet, permasalahan tenaga pendidik, guru K2 hingga persiapan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal Tahun 2021. Pada Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020, Komisi X DPR RI memutuskan untuk melakukan kunjungan pengawasan bidang pendidikan dasar dan menengah, ke Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kunjungan kerja tersebut.

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
4. Perppu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan gambaran umum dan data capaian atas pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait relaksasi penggunaan dana BOS akibat pandemi *Covid-19*, Pendidikan Jarak Jauh, Program

Bantuan Kuota Internet, permasalahan tenaga pendidik, guru K2 dan persiapan Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum) Tahun 2021.

C. RUANG LINGKUP

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui secara langsung mengenai: (i) pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI; (ii) tingkat pemahaman Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap kebijakan pendidikan; (iii) kendala dan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan Pemerintah; dan (iv) masukan dan usulan perbaikan kebijakan Pemerintah.

Fokus kebijakan Pemerintah yang menjadi perhatian Komisi X DPR RI dalam kunjungan ini adalah relaksasi penggunaan dana BOS akibat pandemi Covid-19, Pendidikan Jarak Jauh, Program Bantuan Kuota Internet, permasalahan tenaga pendidik, guru K2 dan persiapan Asesmen Nasional 2021.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

NO	NO. ANGG	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	A-338	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi X	PG
2.	A-539	Dede Yusuf M.E., ST., M.I. Pol.	Wakil Ketua Komisi X	PD
3.	A-137	Dr. Sofyan Tan	Anggota	PDIP
4.	A-227	Rano Karno, S. IP.	Anggota	PDIP
5.	A-237	Dr. Andreas Hugo Pareira	Anggota	PDIP
6.	A-262	Irene Yusiana Roba Putri, S. Sos, M. Comm Mediast.	Anggota	PDIP
7.	A-205	Puti Guntur Sukarno, S. IP.	Anggota	PDIP
8.	A-300	Ferdiansyah, S.E., M.M.	Anggota	PG
9.	A-88	Ir. H. Nuroji	Anggota	PGerindra
10.	A-117	Ali Zamroni, S. Sos.	Anggota	PGerindra
11.	A-16	Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M. Si.	Anggota	PKB
12.	A-566	Anita Jacoba Gah, S.E.	Anggota	PD
13.	A-419	Mustafa Kamal, S.S.	Anggota	PKS
14.	A-497	Desy Ratnasari, M. Si., M. Psi.	Anggota	PAN
15.	A-466	Rojih	Anggota	PPP

Kunjungan kerja ini didampingi oleh Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI.

Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan DPR RI yaitu:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ahmad Mufarod, S.IP | Kasubag TU Setkom X DPR RI |
| 2. Sugianto, S.E. | Staf Setkom X DPR RI |
| 3. Komaria Mahmud, S.Sos | Staf Setkom X DPR RI |
| 4. Hasan Basri, S.Pd., M.M. | TA Komisi X DPR RI |
| 5. Dra. Henny Listyowati, M.Si. | TA Komisi X DPR RI |
| 6. Puntho Pranowo Wienahyu | Media Sosial Setjen DPR RI |
| 7. Iswari Poeji Damai, S.AP. | Bagian Administrasi Keuangan |
| 8. Rospendi | Bagian Kendaraan Setjen DPR RI |

E. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI di terima langsung oleh Bupati Kabupaten Garut H.Rudy Gunawan, yang didampingi oleh:

1. Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat – Asep Sudarsono (Ka. KCD Wilayah XI).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Garut – Totong, S.Pd., M.Si.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut – Dr. Maman Rusmana M.Pd.
4. LPMP Jawa Barat – M Budi S dan Amas Setiana.
5. Ketua PGRI Kabupaten Garut – H. Mahdar.
6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Garut – Anderi Daryana.
7. Organisasi Profesi Pendidikan Kabupaten Garut.
8. Perwakilan Komite Sekolah – Ahmad Hadlan dan H. Ahmad M.
9. Kepala Sekolah Satuan Pendidikan – Iwan Ridwan (SMPN 2 Kertamanah); Kuswara (SMPN 1 Karangpawitan); Aceng Mulyana (SMPN 1 Garut).

II. DATA TEMUAN

A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

Bupati Garut H. Rudy Gunawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPR RI pertama kali ke Kabupaten Garut dilakukan oleh Komisi X DPR RI, juga disampaikan mengenai perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut mengenai terbentuk klaster rumah sakit, klaster perkantoran dan klaster pesantren. Untuk bidang pendidikan, beberapa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas antara lain melalui:

1. Satuan Pendidikan mengangkat Tenaga Honorer yang diberikan insentif (Gaji) dari dana BOS dan anggaran APBD.
2. Usulan pengangkatan CPNS guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
3. Usulan Dana Alokasi Khusus Pendidikan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih menerapkan pembelajaran jarak jauh karena kondisi pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan.

5. Mengembangkan akses dan fasilitas belajar di tengah pandemi dengan menyediakan media pembelajaran dengan bekerjasama dengan saluran TV lokal dan radio.
6. Mengembangkan akses alat peraga pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi sarana prasarana lain sekolah (UKS, toilet, ruang guru, ruang perpustakaan dan ruang laboratorium), penambahan ruang kelas dan pengembangan sekolah satu atap.
7. Peran APBD dalam mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam tiga tahun terakhir dan kedepan, antara lain:
 - 1) Penyediaan Sarana TIK untuk Sekolah.
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penguasaan IT.
 - 3) Bekerjasama dengan penyedia layanan *platform* lokal untuk pembelajaran seperti TV Garut dan Radio Komunitas.
8. Selama pandemi *Covid-19*, melaksanakan relaksasi penggunaan dana BOS untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan, antara lain memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pembelajaran (pulsa, penyediaan media pembelajaran jarak jauh) dan sarana prasarana pada masa *Covid-19*.

B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN

1. Garut memiliki 421 desa, 21 kelurahan dan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Kendala yang ditemui Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengembangkan akses Pembelajaran Jarak Jauh antara lain:
 - 1) Kesiapan infrastruktur, meliputi perangkat maupun jaringan internet masih kurang.
 - 2) Kesiapan siswa dalam kegiatan BDR (Belajar Dari Rumah) secara mandiri masih rendah.
 - 3) Kompetensi siswa dalam penguasaan TIK masih belum maksimal.
 - 4) Kondisi ketersediaan jaringan internet dan komputer.
2. Kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana BOS: keterbatasan anggaran di Sekolah, karena sumber anggaran hanya dari anggaran BOS.
3. BOP Kesetaraan masih ada yang belum teralokasikan, maka dari itu pemerintah Garut masih membutuhkan alokasi tambahan untuk BOP Kesetaraan.
4. Keterbatasan anggaran di APBD untuk fasilitas infrastruktur yang mengakibatkan kesulitan daya tampung kelas yang ada di beberapa kecamatan.
5. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh yaitu siswa tidak memiliki HP Android untuk sarana belajar daring dan tidak tersedia sinyal yang baik/*blankspot*.

C. MASUKAN DAN PANDANGAN

1. Bupati Kabupaten Garut, menyampaikan dua poin besar yang menjadi harapan Pemerintah Daerah untuk menunjang pembangunan pendidikan di daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Pengalokasian dana DAK untuk rehabilitasi SD, sejak tahun 2014 semakin menurun. DAK tahun 2014 sebesar 40 miliar dan tahun 2020 sebesar 18 miliar. Pemerintah Kabupaten Garut masih membutuhkan support anggaran untuk penguatan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Garut meminta penambahan anggaran DAK untuk tahun-tahun berikutnya.
 - b) Pendidikan di Kabupaten Garut khususnya infrastruktur sekolah seperti ruang kelas masih menjadi kendala dan kesulitan untuk menambah ruang kelas oleh karena itu mengusulkan kepada pemerintah untuk membantu infrastruktur kelas di Kabupaten Garut.
2. Kepala Dinas Pendidikan Garut, Dewan Pendidikan, dan PGRI menyampaikan data dan permasalahan antara lain:
- a) Siswa di Kabupaten Garut mencapai 600.000 ribu siswa dari PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK
 - b) Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh masih terkendala akses internet yang belum merata. Meski pendidikan melalui daring hanya 30%, namun terjadi inovasi dan terobosan melalui pembelajaran Luring, antara lain guru mengunjungi siswa yg dikumpulkan dari beberapa desa, mereka memiliki istilah belajar "gorodok to gorodok". Pemda Garut juga memberikan dukungan pembelajaran melalui saluran televisi lokal dengan konten pendidikan yg kreatif.
 - c) Di jenjang Pendidikan SD, Pemerintah Garut apabila uji kompetensi masih mengalami kendala.
 - d) Pemerintah Kabupaten Garut masih kekurangan 15.000 guru, oleh karena itu mengharapkan adanya program 1 juta guru ini menjadi salah satu harapan untuk mengisi kekurangan guru tersebut.
 - e) Jumlah PNS yang ada di bagian selatan Kabupaten hanya memiliki 1 PNS di satu sekolah, maka mengharapkan peningkatan dan tambahan SDM untuk Tenaga PNS di sekolah-sekolah di daerah.
 - f) Perlu ada pola penempatan pengangkatan PNS sesuai kebutuhan di daerah setempat.

III. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut, baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19 terkendala oleh, antara lain:
- a) Pemerintah Kabupaten Garut masih kekurangan 15.000 guru. Jumlah guru pengajar akan makin berkurang seiring dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
 - b) Infrastruktur (ruang kelas) di Kabupaten Garut masih membutuhkan bantuan pembangunan dalam rangka menampung para siswa-siswa sekolah khususnya di jenjang SD.
 - c) Dana BOS tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
 - d) Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar, terdapat kendala seperti adanya sekolah yang berada pada lokasi *blank spot* khususnya di jenjang SD.

- e) Perlu ada pola penempatan pengangkatan PNS sesuai kebutuhan di daerah setempat.
2. Terkait beberapa kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat mengusulkan beberapa hal, yaitu: (i) pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K atau PNS; (ii) peningkatan fasilitas IT untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh; (iii) penambahan anggaran bagi peningkatan sarana prasarana dan dukungan bagi pelaksanaan pendidikan; dan (iv) dukungan peningkatan anggaran DAK untuk rehabilitasi gedung sekolah serta tambahan anggaran BOP Kesetaraan.

IV. REKOMENDASI

1. Mendesak Kemendikbud RI memastikan Kabupaten Garut dapat terpenuhi kebutuhan guru sebanyak 15.000 orang pada rekrutmen PPPK tahun 2021.
2. Mendorong Kemendikbud RI untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas IT maupun peningkatan sarpras pendidikan di Kabupaten Garut.
3. Untuk memenuhi kebutuhan pendidik PNS di Kabupaten Garut, Kemendikbud RI berkoordinasi dengan K/L terkait khususnya BKN RI (Badan Kepegawaian Negara) agar pola pengangkatan dan penempatan pendidik PNS/PPPK berdasarkan kebutuhan di daerah.

V. PENUTUP

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Garut Jawa Barat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 30 November 2020

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338